



LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA



TRIWULAN II

20
25



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Disahkan Tanggal: 27 Juni 2025



Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Dr. H. Iqbal, M. Pd

NIP. 196812311994031026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dan atas karunia, hidayah serta inayah-Nya, Laporan Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran persepsi peserta pelatihan terkait korupsi selama berlangsungnya kegiatan pelatihan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Panitia **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak pelaksanaan survei hingga penyusunan laporan ini. Segala saran dan masukan sangat diperlukan karena kami menyadari adanya kurang-semburna dalam laporan ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya**.

Surabaya, Juni 2025

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN	7
1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI	7
BAB II METODE PENGUKURAN	8
2.1. POPULASI DAN SAMPEL	8
2.2. WAKTU DAN TEMPAT	8
2.3. RESPONDEN	8
2.4. KUESIONER	8
2.5. NILAI PERSEPSI	9
BAB III HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. PROFIL RESPONDEN	10
3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK	14
3.3. REKAPITULASI NILAI	22
BAB IV PENUTUP	25
4.1. KESIMPULAN	25
4.2. REKOMENDASI	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Karakteristik Gender Responden	12
Gambar 3.2.	Karakteristik Kelompok Umur Responden	12
Gambar 3.3.	Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden	13
Gambar 3.4.	Karakteristik Status Kepegawaian Responden	14
Gambar 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan	15
Gambar 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan	16
Gambar 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh	16
Gambar 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah	17
Gambar 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya.....	18
Gambar 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan	19
Gambar 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang.....	20
Gambar 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia	20
Gambar 3.13.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan.....	21
Gambar 3.14.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan	22
Gambar 3.15.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Persepsi.....	9
Tabel 3.1.	Pelatihan oleh BDK Surabaya pada Bulan April - Mei 2025.....	10
Tabel 3.2.	Tingkat Partisipasi Survei	11
Tabel 3.3.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan	15
Tabel 3.4.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan	15
Tabel 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh	16
Tabel 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah	17
Tabel 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya	18
Tabel 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan	19
Tabel 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang	19
Tabel 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia	20
Tabel 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan.....	21
Tabel 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan	22
Tabel 3.13.	Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya	23
Tabel 3.14.	Indeks Persepsi Anti Korupsi per Jenis Pelatihan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah tersusunnya indeks persepsi anti korupsi yang sekaligus menjadi parameter Pemerintah yang Bersih dan Melayani.

Balai Diklat Keagamaan Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang menjadi UPT Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama RI yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan diklat di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 59 tahun 2015, tugas Balai Diklat Keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga administrasi serta tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Diklat yang diselenggarakan terdiri dari diklat sebelum pegawai menduduki jabatan (pelatihan dasar/latsar), diklat dalam jabatan dan diklat kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Surabaya senantiasa terkait dengan aktivitas pelayanan kepada peserta diklat. Diharapkan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya pelayanan pelatihan yang bebas dari korupsi, dilakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Persepsi yang baik dari peserta diklat akan ditunjukkan dari tingginya perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sedangkan IPAK yang rendah menunjukkan kurang pedulinya lembaga terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Perolehan IPAK tersebut selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan terkait pelayanan yang bebas dari korupsi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan guna meningkatkan kualitas layanan secara kontinyu serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Pada laporan ini, pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilakukan selama periode Triwulan kedua Tahun 2025 dengan melibatkan peserta yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tersebut.

1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

BAB II

METODE PENGUKURAN

2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta Pelatihan BDK Surabaya baik itu dalam pola klasikal maupun campuran, yang diselenggarakan selama Triwulan kedua tahun 2025. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *selfchosen respondents*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara *online via google form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan pada April sampai dengan Mei Tahun 2025. Survei dilaksanakan secara *online* di tempat pelatihan masing-masing. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui *google form*. Kuesioner survei dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/persepsikorupsi2025>

2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi adalah peserta Pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama bulan April hingga Mei Tahun 2025. Untuk menghindari bias, responden yang dipilih ialah mereka yang sedang melakukan atau yang telah melakukan pelatihan dalam waktu referensi survei berlangsung.

2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak sepuluh unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala

ordinal, yaitu “selalu”, “sering”, “jarang”, “tidak ada” dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Manipulasi peraturan;
- 2) Penyalahgunaan jabatan;
- 3) Menjual pengaruh;
- 4) Hadiah;
- 5) Transparansi Biaya;
- 6) Pencaloan;
- 7) Perbuatan curang;
- 8) Transaksi rahasia;
- 9) Transparansi Aduan
- 10) Respon terhadap pengaduan.

2.5. NILAI PERSEPSI

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan, tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja pelayanan suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun. Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu, dan kinerja pelayanan.

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang periode Triwulan II Tahun 2025, BDK Surabaya telah melaksanakan 17 Angkatan Pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam pola campuran melalui Pelatihan di Wilayah Kerja. Berikut ditabulasikan pelatihan yang diselenggarakan selama Bulan April hingga Mei 2025 beserta jenis dan pola pelatihannya.

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya pada Bulan April - Mei 2025

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Pola Pelatihan
1	Pelatihan PPMB Kab. Tuban	14-24 April 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
2	Pelatihan PPMB Kab. Bojonegoro	14-24 April 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
3	Pelatihan PPMB Kab. Jember	14-24 April 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
4	Pelatihan PPMB Kab. Tulungagung	28 April - 8 Mei 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
5	Pelatihan PPMB Kab. Trenggalek	28 April - 8 Mei 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
6	Pelatihan PPMB Kab/Kota Blitar	28 April - 8 Mei 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
7	Pelatihan IKM Numerasi MI Kab. Probolinggo	14-24 April 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
8	Pelatihan Manajemen Pondok Pesantren Kab. Pacitan	14-24 Mei 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
9	Pelatihan Manajemen Pondok Pesantren Kab. Situbondo	19-28 Mei 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
10	Pelatihan Manajemen Kemasjidan Kab. Lamongan	14-24 April 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
11	Pelatihan KUB Kab. Lumajang	21-30 April 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran

12	Pelatihan Manajemen Kemasjidan Kab. Bondowoso	14-24 Mei 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
13	Pelatihan Keluarga Sakinah Kab. Banyuwangi	14-24 Mei 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
14	Pelatihan Keluarga Sakinah Kab. Sumenep	14-24 Mei 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
15	Pelatihan Manajemen Pembelajaran Madin Kab. Bangkalan	19-28 Mei 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
16	Pelatihan Manajemen Pembelajaran Madin Kab. Sampang	19-28 Mei 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
17	Pelatihan Kerukunan Umat Beragama Kab. Pamekasan	19-28 Mei 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran

Untuk memperoleh hasil pengukuran yang representatif, survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) melibatkan sejumlah responden dari berbagai unit kerja. Sub bab ini menyajikan profil responden yang mencakup karakteristik demografis maupun jabatan yang menjadi latar belakang partisipasi mereka dalam survei. Selama periode survei, sebanyak **236 responden** telah berpartisipasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dalam triwulan kedua Tahun 2025, tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan adalah sebanyak **121 responden**. Tingkat partisipasi survei untuk Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan sebanyak **72 responden** sedangkan tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebanyak **43 responden**. Responden tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori responden untuk diketahui karakteristiknya.

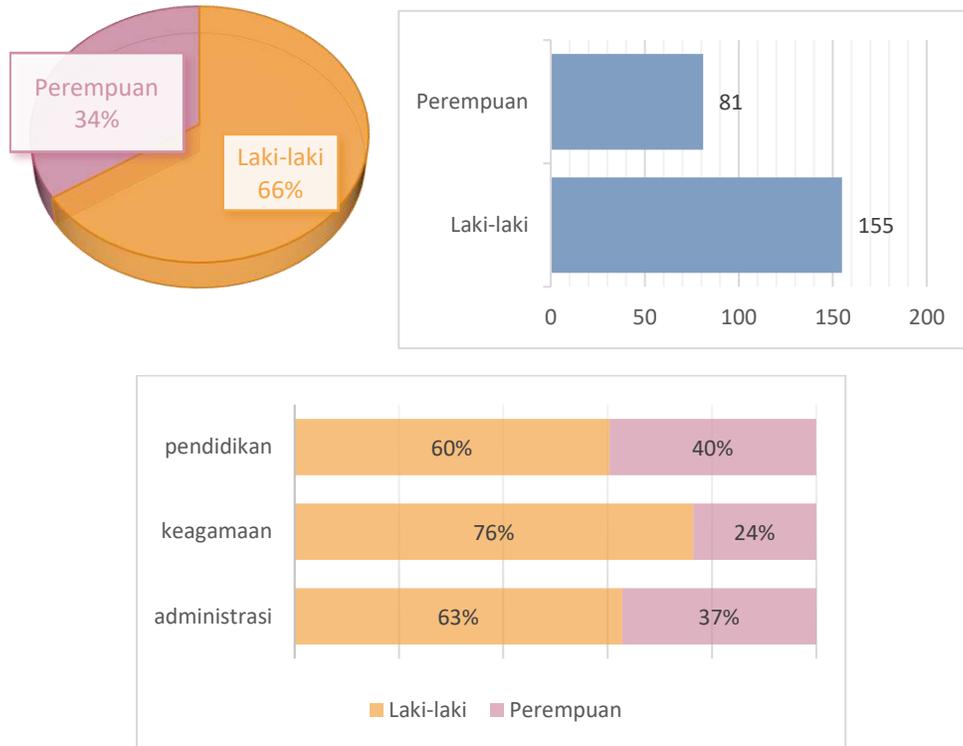
Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei

Jenis Pelatihan	Jumlah Responden Terlibat
Pelatihan Teknis Pendidikan	121
Pelatihan Teknis Keagamaan	72
Pelatihan Administrasi	43

Berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), jumlah responden terdiri atas 155 laki-laki (66%) dan 81 perempuan (34%). Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam survei ini didominasi oleh pegawai laki-laki.

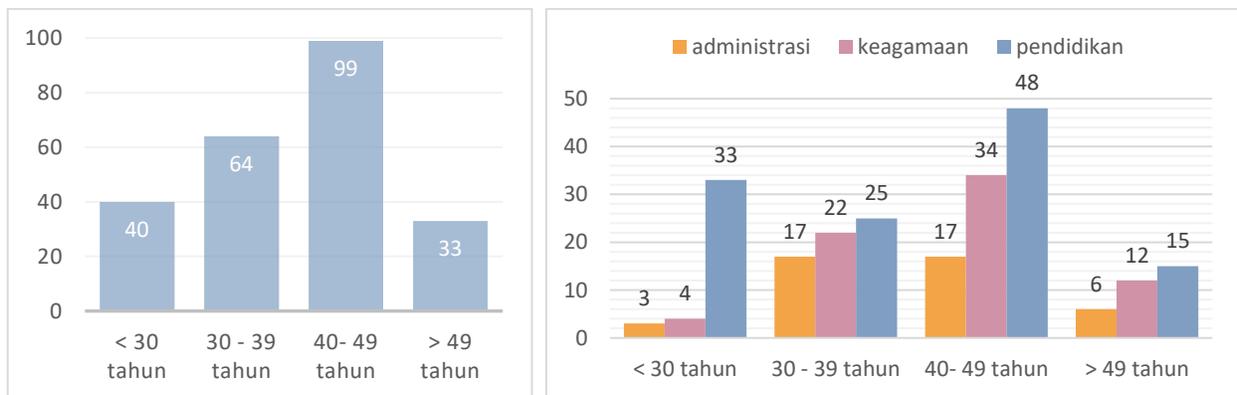
Jika ditinjau berdasarkan jenis pelatihan, perbandingan gender juga menunjukkan pola yang serupa. Pada pelatihan teknis pendidikan, sebanyak 60% responden adalah laki-laki dan 40% perempuan. Pada pelatihan teknis keagamaan, proporsi laki-laki mencapai 76%, sedangkan

perempuan hanya 24%. Sementara itu, pada pelatihan administrasi, partisipasi laki-laki sebesar 63% dan perempuan sebesar 37%.



Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden

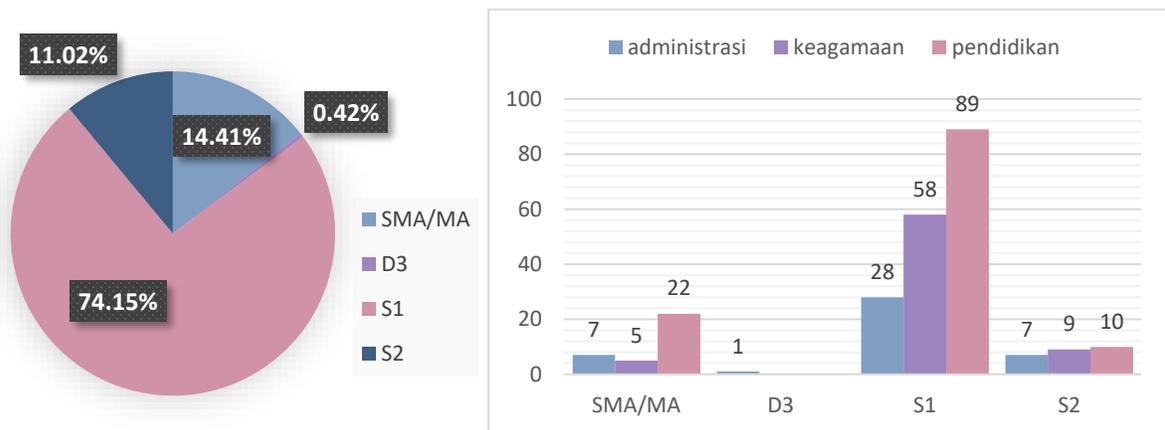
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum keterwakilan gender dalam survei masih belum seimbang, khususnya pada pelatihan tenaga teknis keagamaan, yang menunjukkan kesenjangan paling besar antara responden laki-laki dan perempuan. Meski demikian, proporsi ini mencerminkan kondisi riil distribusi peserta pelatihan pada masing-masing jenis pelatihan.



Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden

Berdasarkan gambar 3.2 diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 40–49 tahun, dengan jumlah 99 orang. Diikuti oleh kelompok 30–39 tahun sebanyak 64 orang, dan kelompok usia di bawah 30 tahun sebanyak 40 orang. Sementara itu, kelompok usia di atas 49 tahun memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 33 orang. Pada kelompok usia kurang dari 30 tahun, dominasi responden berasal dari pelatihan tenaga pendidikan. Sedangkan pada kelompok usia lain, distribusi relatif merata namun masih dengan dominasi dari pelatihan tenaga teknis pendidikan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia produktif 30–49 tahun, dengan kontribusi paling besar berasal dari pelatihan tenaga teknis pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi yang terekam dalam survei berasal dari individu dengan pengalaman kerja menengah hingga senior, yang kemungkinan telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kerjanya.



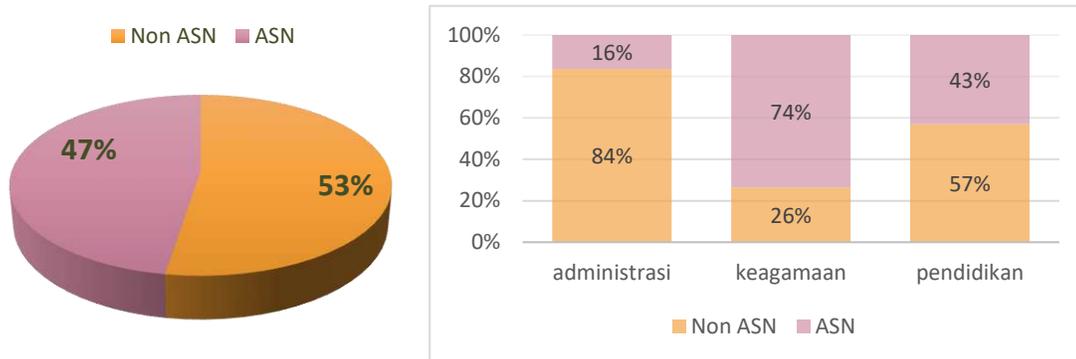
Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 3.3, mayoritas responden dalam survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) memiliki pendidikan terakhir S1, yaitu sebanyak 74,15% dari total responden. Selanjutnya, pendidikan SMA/MA menempati urutan kedua sebesar 14,41%, diikuti oleh S2 sebesar 11,02%, dan diploma sebanyak 0,42%.

Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan jenis pelatihan, responden dari pelatihan tenaga teknis pendidikan paling banyak memiliki pendidikan terakhir S1 (89 orang), dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan S2 (10 orang), serta SMA/MA (22 orang). Dari pelatihan tenaga teknis keagamaan, sebagian besar juga berpendidikan S1 (58 orang), disusul oleh S2 (9 orang), dan SMA/MA (5 orang). Pada pelatihan tenaga administrasi, mayoritas berpendidikan S1 (28 orang), diikuti oleh S2 (7 orang), SMA/MA (7 orang), dan D3 (1 orang).

Secara keseluruhan, komposisi pendidikan terakhir responden menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan tinggi (minimal S1). Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam survei ini secara umum memiliki kapasitas akademik

yang memadai untuk memahami dan menilai nilai-nilai integritas serta isu-isu antikorupsi yang menjadi fokus dalam pengukuran IPAK.



Gambar 3.4. Karakteristik Status Kepegawaian Responden

Pada triwulan II tahun 2025, komposisi status kepegawaian responden dalam survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terdiri dari 53% Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 47% Non-ASN. Hal ini menunjukkan bahwa responden survei relatif seimbang antara pegawai tetap (ASN) dan pegawai non tetap (Non-ASN). Jika diperhatikan lebih lanjut berdasarkan jenis pelatihan, pada pelatihan tenaga administrasi, mayoritas responden berasal dari kalangan Non-ASN sebesar 84%, dan hanya 16% responden yang merupakan ASN. Berbeda halnya dengan pelatihan tenaga teknis keagamaan, di mana 74% responden adalah ASN dan 26% merupakan Non-ASN, menunjukkan dominasi pegawai tetap di pelatihan ini. Untuk pelatihan tenaga teknis pendidikan, proporsi relatif lebih seimbang, antara ASN sebanyak 57% dan Non-ASN sebanyak 43%.

Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dari berbagai jenis status kepegawaian cukup beragam dan merepresentasikan kondisi nyata pada kepesertaan pelatihan. Perbedaan proporsi ASN dan Non-ASN di tiap jenis pelatihan juga dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam lingkungan kerja masing-masing.

3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat sepuluh unsur yang dinilai dalam survei Persepsi Anti Korupsi. Berikut ini akan diuraikan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk masing-masing unsur.

3.2.1. Penilaian Setiap Unsur

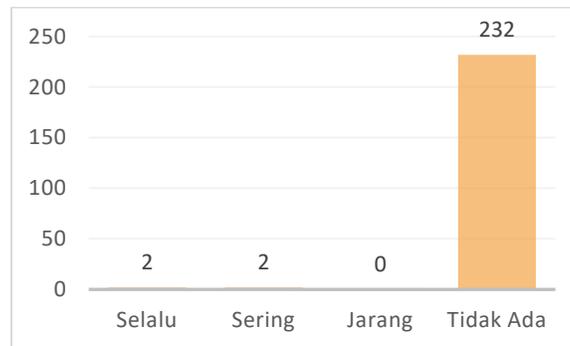
a. Manipulasi Peraturan

Dari total responden sebanyak 239 responden, 232 orang di antaranya setuju bahwa tidak ada manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang menyatakan jarang menemui peristiwa manipulasi peraturan di BDK Surabaya, dan 2

orang lain menyatakan selalu menemui peristiwa manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap indikator manipulasi peraturan mendapatkan indeks sebesar **3,97**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	2	0,85%
Sering	2	2	0,85%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	232	98,31%
Jumlah		236	100%



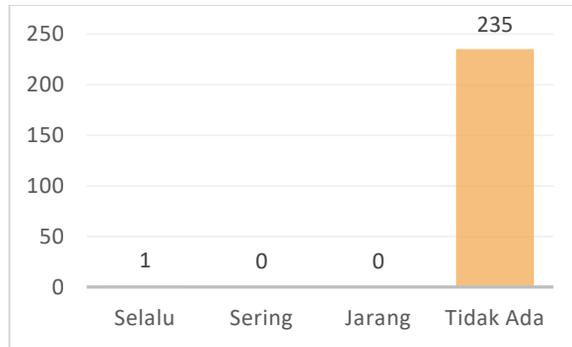
Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

b. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1-4, persepsi mengenai penyalahgunaan jabatan berhasil mencapai indeks **3,99**. Indeks ini diperoleh berkat sebanyak 235 responden menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan di lingkungan BDK Surabaya. Sisanya menyatakan selalu melihat ada penyalahgunaan jabatan, yakni sebanyak 0,42 persen. Dari perolehan indeks tersebut, BDK Surabaya dinyatakan **bersih dari penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,42%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	235	99,58%
Jumlah		239	100%



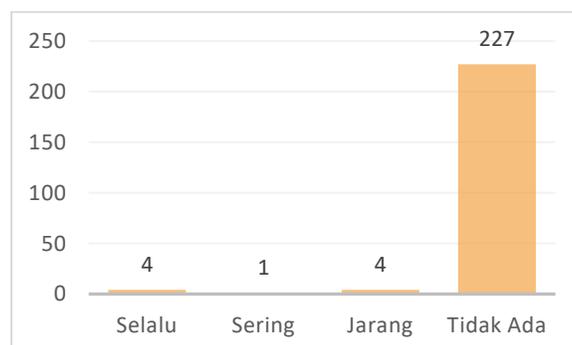
Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

c. Menjual Pengaruh

Dari total 236 responden, 227 orang diantaranya menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya untuk membantu pengurusan berkas tertentu. Sebanyak 4 orang menyatakan jarang ada pegawai BDK Surabaya yang menjual pengaruh untuk tindakan korupsi, sedangkan sisanya menyatakan sering (1 orang) dan selalu (4 orang) ada pegawai BDK Surabaya yang menjual pengaruhnya. Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan nilai persepsi sebesar **3,92** sehingga dapat disimpulkan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	4	1,69%
Sering	2	1	0,42%
Jarang	3	4	1,69%
Tidak Ada	4	227	96,19%
Jumlah		236	100%



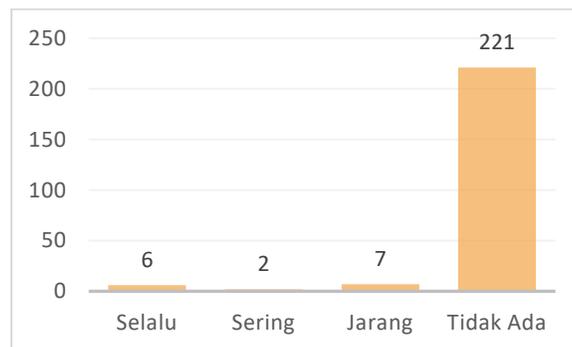
Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

d. Hadiah

Persepsi untuk unsur ini diukur melalui pertanyaan, “Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta?”. Berdasarkan hasil survei terhadap 236 responden, mayoritas responden, yaitu 93,64% (221 orang), menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih dalam bentuk apapun atas layanan yang diterima. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip integritas dan antikorupsi dalam lingkungan kerja. Sebaliknya, terdapat 6 responden (2,54%) yang menyatakan selalu memberikan tanda terima kasih, 2 responden (0,85%) yang menjawab sering, dan 7 responden (2,97%) yang menjawab jarang.

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	6	2,54%
Sering	2	2	0,85%
Jarang	3	7	2,97%
Tidak Ada	4	221	93,64%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pemberian hadiah atau imbalan atas layanan, meskipun tidak diminta, bukanlah kebiasaan umum di kalangan responden survei ini. Dari pengumpulan data ini, diperoleh indeks persepsi sebesar **3,88**. Angka ini dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari gratifikasi** atau penerimaan hadiah.

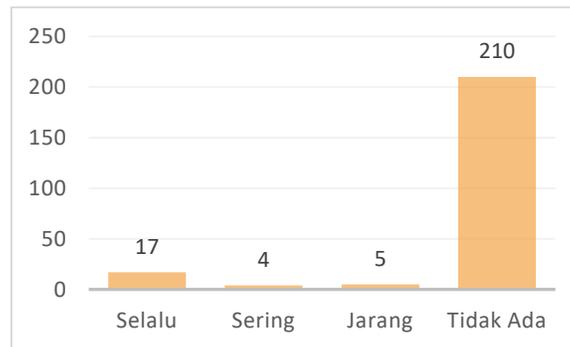
e. Transparansi Biaya

Biaya/tarif pelayanan yang dibebankan kepada peserta dalam rangka mengikuti Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) adalah 0 (nol) rupiah atau gratis. Di samping sertifikat, peserta juga berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Honorarium ini diserahkan setelah pelatihan berakhir dan dibuktikan melalui SPJ yang diserahkan kepada masing-masing peserta. Melalui SPJ inilah rincian honorarium peserta dapat dilihat. Dalam rangka mengukur persepsi publik mengenai transparansi

biaya di BDK Surabaya, tim survei mengajukan pertanyaan berupa, “Apakah BDK Surabaya tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses layanan pelatihan dilakukan?”

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	17	7,20%
Sering	2	4	1,69%
Jarang	3	5	2,12%
Tidak Ada	4	210	88,98%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

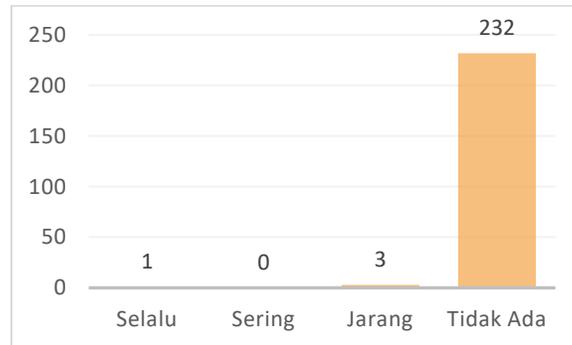
Dari total 236 responden yang mengikuti survei, sebanyak 210 responden (88,98%) menyatakan bahwa tidak ada praktik ketidaktransparanan terkait bukti transaksi keuangan setelah proses layanan pelatihan dilakukan. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan di lingkungan BDK Surabaya. Namun demikian, masih terdapat 17 responden (7,20%) yang menjawab selalu, 4 responden (1,69%) yang menjawab sering, dan 5 responden (2,12%) yang menjawab jarang mengalami tidak diberikannya bukti transaksi keuangan. Berdasarkan data tersebut, didapatkan indeks persepsi anti korupsi sebesar **3,73**. Angka tersebut menunjukkan bahwa publik percaya BDK Surabaya **bersih dalam hal transparansi biaya**.

f. Pencaloan

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 232 orang (98,31%), menyatakan tidak pernah mengalami atau mengetahui praktik pencaloan dalam proses layanan pelatihan di BDK Surabaya. Temuan ini mencerminkan persepsi yang sangat positif terhadap integritas proses penentuan, penempatan, atau pemilihan peserta pelatihan, yang bebas dari perantara atau pihak ketiga yang tidak sah. Sementara itu, hanya 1 responden (0,42%) yang menjawab selalu, dan 3 responden (1,27%) yang menjawab jarang terdapat praktik pencaloan. Tidak ada responden yang menjawab sering.

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,42%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	3	1,27%
Tidak Ada	4	232	98,31%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

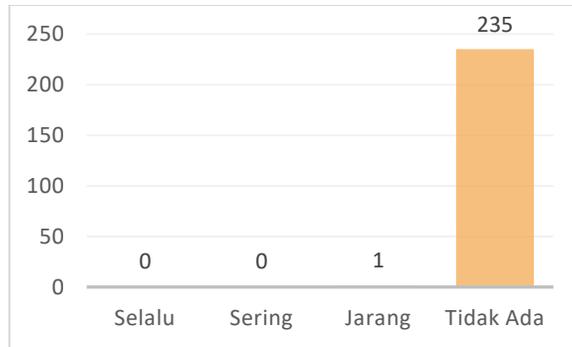
Dari skala 1-4 unsur pencaloan memperoleh indeks persepsi sebesar 3,97. Hal ini berarti para responden menganggap bahwa layanan pelatihan yang diberikan oleh BDK Surabaya bersih dari unsur pencaloan.

g. Perbuatan Curang

Berdasarkan hasil survei terhadap 236 responden, mayoritas mutlak, yaitu 235 responden (99,58%), menyatakan tidak pernah mengetahui atau mengalami adanya perbuatan curang dalam proses penyelenggaraan pelatihan di BDK Surabaya. Sementara itu, hanya 1 responden (0,42%) yang menjawab bahwa perbuatan curang jarang terjadi di BDK Surabaya.

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	0,42%
Tidak Ada	4	235	99,58%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

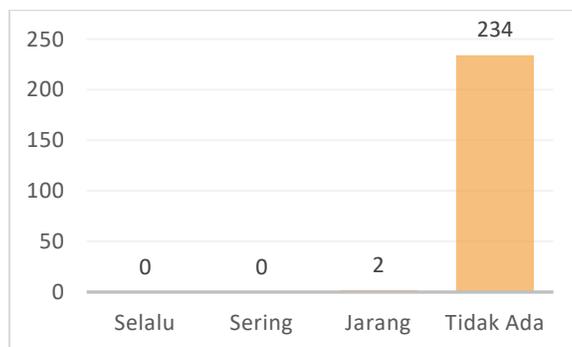
Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BDK Surabaya sangat baik, dengan hampir seluruh responden meyakini bahwa prosedur dan proses yang berlangsung bebas dari tindakan curang. Berdasarkan perolehan tersebut, BDK Surabaya dinyatakan **bersih dari perbuatan curang** dengan indeks persepsi anti korupsi sebesar **3,996**.

h. Transaksi Rahasia

Pada triwulan kedua tahun 2025, unsur transaksi rahasia memperoleh indeks persepsi sebesar **3,99**. Terdapat 234 orang (99,15%) yang percaya bahwa tidak ada praktik transaksi rahasia dalam proses layanan pelatihan di BDK Surabaya. Sementara itu, hanya 2 responden (0,85%) yang menjawab jarang, dan tidak ada responden yang memilih jawaban sering maupun selalu.

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	2	0,85%
Tidak Ada	4	234	99,15%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

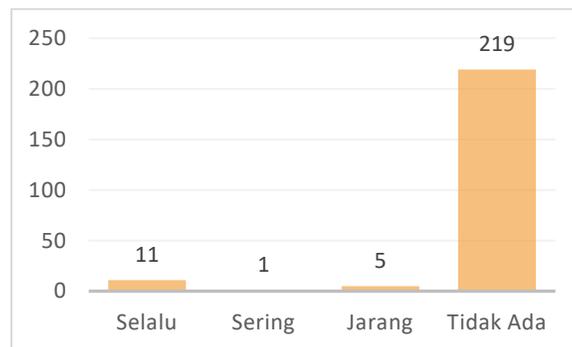
Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa BDK Surabaya telah membangun sistem layanan publik yang berintegritas dan akuntabel, serta berhasil menjaga kepercayaan para pengguna layanan terhadap prinsip antikorupsi. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan bahwa publik menganggap BDK Surabaya **bersih dari transaksi rahasia**.

i. Transparansi Aduan

Sebanyak 219 responden atau sekitar 94,98 persen dari total responden mengatakan bahwa BDK Surabaya terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi. Namun demikian, terdapat 11 responden (4,66%) yang berpendapat bahwa BDK Surabaya selalu tidak terbuka terhadap laporan masyarakat, diikuti oleh 1 responden (0,42%) yang menjawab sering, dan 5 responden (2,12%) yang menjawab jarang. Meskipun jumlahnya kecil, persepsi negatif ini menjadi sinyal bagi instansi untuk terus memperkuat sistem layanan pengaduan, termasuk melalui peningkatan akses informasi, kejelasan prosedur pelaporan, serta tindak lanjut yang transparan.

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	11	4,66%
Sering	2	1	0,42%
Jarang	3	5	2,12%
Tidak Ada	4	219	92,80%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Dari skala 1-4, indeks persepsi yang diperoleh untuk unsur transparansi aduan adalah sebesar **3,83**. Berdasarkan perolehan indeks persepsi ini, BDK Surabaya dapat dikatakan **bersih dalam hal transparansi aduan**.

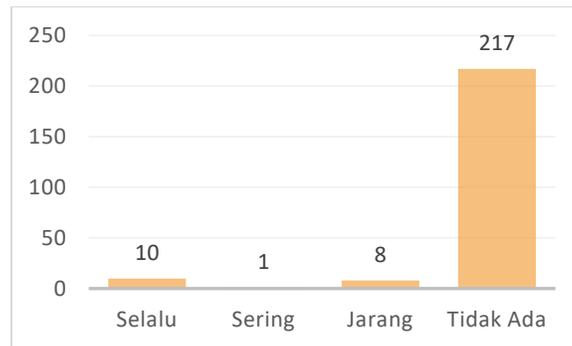
j. Respon Terhadap Aduan

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 236 responden, mayoritas responden, yaitu sebanyak 217 orang (91,95%) menyatakan bahwa BDK Surabaya tidak lambat dalam

merespon pengaduan atau laporan masyarakat terkait korupsi. Hal ini mengindikasikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap responsivitas dan kesigapan lembaga dalam menangani laporan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kecil responden yang menyatakan adanya kelambatan respons, dengan rincian: 10 responden (4,24%) menjawab selalu, 1 responden (0,42%) menjawab sering, dan 8 responden (3,39%) menjawab jarang.

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	10	4,24%
Sering	2	1	0,42%
Jarang	3	8	3,39%
Tidak Ada	4	217	91,95%
Jumlah		236	100%



Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Temuan ini menandakan bahwa meskipun secara umum pelayanan pengelolaan aduan telah dianggap baik, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal kecepatan dan konsistensi penanganan laporan, terutama untuk memastikan seluruh laporan masyarakat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan transparan. Dalam skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur respon terhadap aduan mencapai indeks **3,83** yang berarti bahwa BDK Surabaya **bersih dalam hal respon terhadap aduan**.

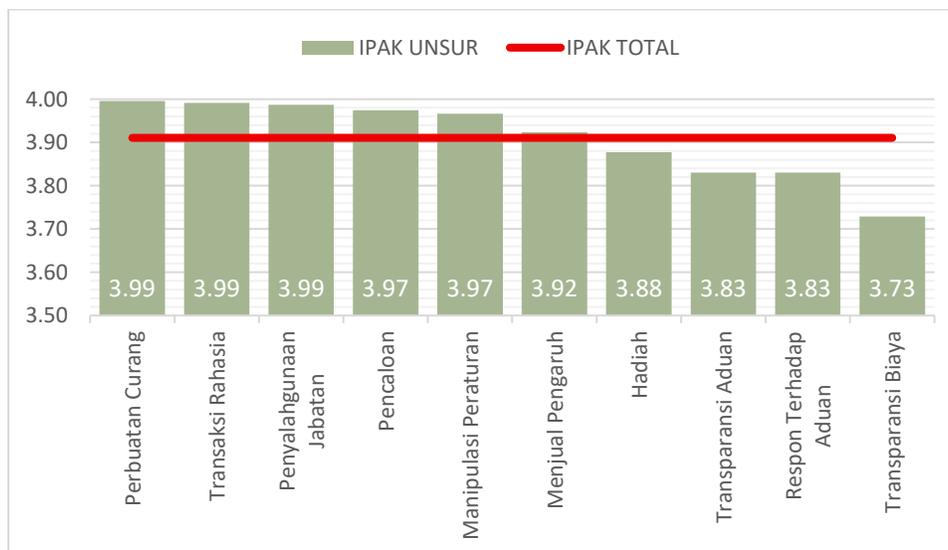
3.3. REKAPITULASI NILAI

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap sembilan unsur persepsi anti korupsi, BDK Surabaya memperoleh nilai IPAK sebesar **3,91** dari skala maksimal **4,00**, yang secara umum dikategorikan sebagai satuan kerja yang **“Bersih dari Korupsi”**. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden menilai penyelenggaraan layanan di BDK Surabaya telah dijalankan dengan tingkat integritas yang tinggi, minim dari praktik-praktik korupsi, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta transparansi publik.

Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya

UNSUR PENILAIAN	NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
MANIPULASI PERATURAN	3,97	Bersih dari korupsi
PENYALAHGUNAAN JABATAN	3,99	Bersih dari korupsi
MENJUAL PENGARUH	3,92	Bersih dari korupsi
HADIAH	3,88	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI BIAYA	3,73	Bersih dari korupsi
PENCALOAN	3,97	Bersih dari korupsi
PERBUATAN CURANG	3,99	Bersih dari korupsi
TRANSAKSI RAHASIA	3,99	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI ADUAN	3,83	Bersih dari korupsi
RESPON TERHADAP ADUAN	3,83	Bersih dari korupsi
NILAI IPAK	3,91	Bersih dari korupsi

Dari sembilan unsur penilaian, terdapat tiga indikator yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu Perbuatan Curang, Transaksi Rahasia, dan Penyalahgunaan Jabatan. Ketiga indikator ini memperoleh indeks persepsi sebesar 3,99 dan mencerminkan persepsi publik yang sangat positif terhadap etika dan transparansi internal penyelenggara layanan. Selain itu nilai ini juga menjadi indikasi tidak ditemukannya praktik penyalahgunaan kewenangan maupun transaksi tertutup di luar prosedur.



Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian

Sementara itu, indikator dengan nilai paling rendah adalah Transparansi Biaya dengan indeks persepsi sebesar 3,73. Nilai ini meskipun masih dalam kategori “bersih dari korupsi”, menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi mengenai biaya atau bukti transaksi perlu menjadi perhatian utama untuk perbaikan ke depan. Persepsi masyarakat terkait transparansi biaya menjadi salah satu indikator krusial yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan. Selain itu, dua

unsur lain dengan nilai relatif lebih rendah dibanding unsur lainnya adalah Transparansi Aduan dan Respon terhadap Aduan yang keduanya memperoleh indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,83. Kedua unsur ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas dalam pengelolaan laporan/pengaduan, baik dari sisi keterbukaan informasi maupun kecepatan dan kejelasan tindak lanjut. Nilai persepsi untuk unsur hadiah juga relatif lebih rendah daripada unsur lain. Seperti tampak pada gambar 3.15, indeks persepsi anti korupsi untuk unsur hadiah berada di bawah IPAK total. Perlu dipahami bahwa pemberian hadiah, walaupun dalam konteks “tanda terima kasih”, dapat membuka ruang abu-abu etika pelayanan publik. Untuk menjaga standar profesionalisme dan mencegah terjadinya konflik kepentingan, diperlukan penguatan budaya pelayanan yang menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Jenis Pelatihan

UNSUR PENILAIAN	IPAK		
	PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI	PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	PELATIHAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN
Manipulasi Peraturan	3,98	3,97	3,96
Penyalahgunaan Jabatan	4,00	4,00	3,96
Menjual Pengaruh	3,93	3,93	3,90
Hadiah	3,95	3,83	3,92
Transparansi Biaya	3,88	3,64	3,78
Pencalaan	4,00	3,96	3,99
Perbuatan Curang	3,98	4,00	4,00
Transaksi Rahasia	4,00	3,99	3,99
Transparansi Aduan	3,86	3,74	3,96
Respon Terhadap Aduan	3,79	3,83	3,86
NILAI IPAK	3,94	3,89	3,93

Ketiga jenis pelatihan mendapatkan predikat “bersih dari korupsi” dengan perolehan IPAK di atas 3,80. Pelatihan tenaga administrasi mencatat IPAK tertinggi sebesar 3,94. Disusul pelatihan tenaga teknis keagamaan dengan nilai 3,93. Sementara itu, pelatihan tenaga teknis pendidikan memperoleh IPAK yang relatif lebih rendah dibanding jenis pelatihan lain yaitu 3,89. Perbedaan nilai ini meskipun kecil, menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas layanan lebih kuat pada pelatihan tenaga administrasi dibandingkan dua jenis pelatihan lainnya.

Terdapat beberapa unsur yang memperoleh nilai tertinggi secara konsisten di setiap jenis pelatihan, yaitu penyalahgunaan jabatan (4,00) pada pelatihan administrasi dan pelatihan teknis pendidikan. Selain itu, unsur perbuatan curang (4,00) pada pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan teknis keagamaan. Sementara unsur transaksi rahasia mendapatkan IPAK 4,00 untuk pelatihan administrasi, dan hampir sempurna di dua jenis pelatihan lain yaitu 3,99.

Secara umum, unsur dengan nilai terendah adalah transparansi biaya terutama pada pelatihan teknis pendidikan (3,64) dan pelatihan teknis keagamaan (3,78) serta unsur transparansi aduan yang nilainya rendah pada pelatihan teknis pendidikan yakni sebesar 3,74.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik (peserta pelatihan).

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya pada triwulan kedua tahun 2025 mencapai nilai **3,91** dari skala 4. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari korupsi.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari **perbuatan curang, transaksi rahasia, dan penyalahgunaan jabatan** mencapai 3,99 dari skala 4. Ketiga unsur ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan unsur lainnya.
3. Unsur **transparansi biaya** merupakan unsur dengan nilai persepsi paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Meski begitu, secara umum kinerja untuk unsur ini masuk dalam kategori “bersih dari korupsi”.

4.2. REKOMENDASI

Beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap layanan BDK Surabaya antara lain:

1. Panitia kegiatan memberikan penjelasan mengenai rincian honorarium peserta pada saat pengarahan program pelatihan serta memberikan cetak fisik rincian honorarium peserta sebagai upaya transparansi biaya.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SP4N – LAPOR! dalam upaya penghimpunan aduan masyarakat terkait korupsi. Penghimpunan aduan kemudian dilaporkan pada masyarakat melalui infografis yang dipublikasikan di media sosial, beserta tindak lanjutnya.
3. Mengoptimalkan keberadaan lemari anti gratifikasi untuk menanggapi hadiah-hadiah yang diberikan oleh peserta pelatihan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5d5Z4zXyJNJR6d3N8iVio35FL1gJdR0KQxWU9sxxrYpJ4ac3w/viewform

Photopea | Online P... Google Sheets Tuto... Adobe Acrobat Membuat database... Pohon Kineja Kota All Bookmarks



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA**

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA TAHUN 2025

Bapak/Ibu yang terhormat,
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadi lembaga yang bersih dari korupsi.

Oleh karena itu, kami mengadakan survey secara online. Tujuan survey ini adalah untuk melihat persepsi peserta pelatihan terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Melalui Survei Persepsi Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2025, kami berharap mampu memetakan potensi korupsi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas dari korupsi.

<p>Jenis Kelamin *</p> <p><input type="radio"/> Laki-laki</p> <p><input type="radio"/> Perempuan</p>	<p>Pangkat/Golongan *</p> <p>Pilih</p>
<p>Usia *</p> <p>Jawaban Anda</p>	<p>No. HP</p> <p>Jawaban Anda</p>
<p>Pendidikan Terakhir *</p> <p><input type="radio"/> SMA/MA</p> <p><input type="radio"/> D3</p> <p><input type="radio"/> S1</p> <p><input type="radio"/> S2</p> <p><input type="radio"/> S3</p>	<p>Instansi *</p> <p>Contoh: Kankemenag Kab. Pacitan</p> <p>Jawaban Anda</p>
	<p>Unit Tugas *</p> <p>Jawaban Anda</p>

Pelatihan yang Diikuti pada Tahun 2025 *

Pilih

Apakah pemberian layanan di BDK Surabaya dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah layanan pada BDK Surabaya diberikan dengan permintaan imbalan tertentu oleh petugas? (Penyalahgunaan Jabatan) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda menandatangani bukti transaksi berupa SPJ atas hak-hak yang diterima? (Transparansi) *

1. Tidak Ada 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

1 2 3 4

Apakah Anda pernah mengetahui ada praktik pencaloan dalam proses layanan di BDK Surabaya? (Pencaloan) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktik KKN di BDK Surabaya? (Perbuatan Curang) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Pernahkah Anda dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya yang akan membantu dalam pengurusan berkas tertentu? (Menjual Pengaruh) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta? (Hadiah) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah Anda pernah mengurus berkas tertentu melalui pegawai BDK Surabaya di luar kantor? (Transaksi Rahasia) *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah BDK Surabaya tidak terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi? *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi? *

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Lampiran 2. Rekap Respon

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data structure:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	JK	Usia	Kel. Usia	Pendid	Pangkat/Olongan	Pelatihan yang Dikuti pada Tahun 202	Instansi	Rumpun	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10			
1	Perempuan	41	40- 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Pelatihan Kerukunan Umat Beragama	Kankemenag Kab. Ngawi	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2	Laki-laki	47	40- 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
3	Laki-laki	50	> 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4	Laki-laki	46	40- 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	Laki-laki	52	> 49 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6	Laki-laki	40	40- 49 tahun	S2	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
7	Laki-laki	53	> 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8	Laki-laki	49	40- 49 tahun	SMA/MA	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
9	Laki-laki	46	40- 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
10	Laki-laki	44	40- 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
11	Laki-laki	44	40- 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
12	Laki-laki	55	> 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kemenag kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
13	Laki-laki	47	40- 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjdan	Kankemenag Kab. Lamongan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
14	Laki-laki	39	30 - 39 tahun	SMA/MA	Non ASN	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	2	4	
15	Laki-laki	51	> 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
16	Perempuan	48	40- 49 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
17	Perempuan	42	40- 49 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
18	Laki-laki	44	40- 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4		
19	Perempuan	32	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	MH Hidayatul Mubtadin Wedi	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20	Perempuan	45	40- 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Pelatihan KMI Pembelajaran Berdiferens	Kankemenag kab. Pacitan	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
21	Perempuan	47	40- 49 tahun	S1	Penata - III/c	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
22	Perempuan	25	< 30 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
23	Perempuan	41	40- 49 tahun	S1	Pengatur - III/c	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
24	Laki-laki	34	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
25	Laki-laki	47	40- 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
26	Perempuan	32	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderas	Kankemenag Kab. Bojonegoro	pendidikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		